

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Literasi Keuangan

a. Pengertian literasi Keuangan

Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menuju kehidupan yang sejahtera secara ekonomi dimasa yang akan datang. Dengan pengalokasian pendapatan dan keuangan yang baik dan tepat menjadi salah satu syarat seseorang untuk menunjang kesejahteraan hidup yang lebih baik. Seberapa besarpun pendapat seseorang, jika tidak dibarengi dengan pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik dan tepat, maka hal tersebut malah akan menjadi ganjalan untuk kehidupan dimasa depan.

(Lusardi, 2014) menyatakan bahwa literasi keuangan ialah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu untuk memperbaiki taraf hidup dengan upaya pemahaman terhadap perencanaan dan pengalokasian sumber daya keuangan yang tepat dan efisien. (Huston, 2010) menyatakan bahwa literasi keuangan sebagai keahlian yang dimiliki oleh individu dengan kemampuannya mengelola pendapatannya agar tercapai peningkatan kesejahteraan finansial. (Anggraeni, 2015) juga mengatakan bahwa literasi keuangan yang menjadi hal dasar yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap

individu karena berpengaruh terhadap kondisi keuangan seseorang serta memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang baik dan tepat.

(Agusta, 2016) menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan keuangan seperti kemampuan untuk menghitung pembayaran bunga majemuk serta kemampuan keuangan yang lebih umum, misalnya perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian keuangan. Menurut (Agusta, 2016) literasi keuangan memiliki implikasi yang berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan disetiap Negara. Literasi keuangan pada negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi menjadi pelengkap perlindungan konsumen untuk akses terhadap produk dan layanan lembaga keuangan. Sedangkan pada negara yang memiliki pendapatan yang rendah atau biasa disebut dengan negara berkembang, literasi keuangan lebih berfokus pada peningkatan layanan keuangan dan peningkatan akses keuangan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat pada negara berkembang memiliki kendala dalam jangkauan terhadap lembaga keuangan dan akses yang hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat saja karena keterbatasan wawasan.

Definisi literasi keuangan menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 menyatakan bahwa litererasi

keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Literasi keuangan diharapkan oleh OJK memberikan manfaat kepada masyarakat luas seperti kemampuan untuk memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan membuat perencanaan keuangan yang baik, dan terhindar dari investasi yang tidak jelas.

b. Aspek-aspek Literasi Keuangan

(Chen, 1998) membagi literasi keuangan menjadi 4 aspek dalam pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pribadi yang meliputi:

1. *General Personal Finance*, yaitu kemampuan untuk memahami sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Rasyid (2012) menjelaskan bahwa *general Personal Finance* adalah pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum. Sedangkan manajemen keuangan adalah sesuatu proses perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan.
2. *Saving and borrowing*, yaitu kemampuan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman.
3. *Insurance*, pemahaman individu tentang pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti seperti asuransi pendidikan dan asuransi jiwa.

4. *Investment*, yaitu kemampuan dasar untuk memahami sesuatu yang berkaitan tentang suku bunga, risiko investasi, pasar modal, reksadana, dan deposito.

Sedangkan menurut (Darman Nababan, 2013) menjelaskan bahwa dalam literasi keuangan terdapat beberapa aspek yang meliputi:

1. *Basic Personal Finance*, yaitu tentang pengetahuan dasar yang dimiliki oleh individu dalam memahami system keuangan seperti inflasi, suku bunga, likuiditas asset, kredit dan lain sebagainya.
2. *Cash Management* (manajemen uang), yaitu kemampuan seseorang untuk mengelalo keuangan mereka secara baik dan tepat. Jika seseorang individu memiliki tingkat literasi keuangan yang baik dan tepat. Jika seseorang individu memiliki tingkat keuangfan yang baik maka akan semakin baik mereka dalam mengelola keuangannya.
3. *Credit and Dept Management*

Credit management (managemen kredit) merupakan suatu proses kegiatan yang saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam pengumpulan dan penajian informasi perkreditan suatu bank.

Sedangkan *dept management* (manajemen hutang) adalah proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak untuk membantu untuk peminjaman hutang.

4. *Saving* (Tabungan), yaitu bagian dari penghasilan seseorang yang tidak digunakan untuk konsumsi, melainkan dialokasikan untuk menjadi simpanan. Mempelajari seseorang bagaimana mereka mampu untuk menyisihkan sebagian dari sumber pendapatannya.
5. *Investment* (Investasi), yaitu hal ini berkaitan tentang pengetahuan seseorang tentang investasi. Bagaimana seorang individu menggunakan keuangan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih dimasa yang akan datang. Hal ini berkaitan tentang pengetahuan seseorang tentang pasar modal, reksadana, deposito, suku bunga, dan lain-lain.
6. *Risk Management* (Manajemen risiko), adalah pelaksanaan fungsi fungsi manajemen dalam menghadapi penanggulangan risiko, terlebih risiko yang dihadapi oleh perusahaan, keluarga dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengelola risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dihadapi atau mengoptimalkan keuntungan yang ada (Djojosoedarso, 2003:4).

(Remund, 2010) menjelaskan bahwasanya dalam literasi keuangan memiliki lima domain yaitu :

1. Pengetahuan tentang konsep keuangan.
2. Kemampuan berkomunikasi tentang konsep keuangan.
3. Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi.
4. Kemampuan dalam membuat keputusan keuangan.
5. Keyakinan membuat perencanaan keuangan masa depan.

c. Klasifikasi Literasi keuangan

OJK membagi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi empat, yaitu :

1. *Well literate*, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, mamfaat dab risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate*, memiliki keyakinan dan pengetahuan tentang lembaga jasa keungan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate*, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap terhadap lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not Literlate*, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Edukasi tentang literasi keuangan menjadi tugas yang penting untuk Indonesia, salah satu upaya yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjalankan program Strategi

Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yang diharapkan akan membantu dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi selain dari OJK, para kaum akademisi harus ikut serta dalam proses edukasi keuangan karena mereka memiliki modal intelektual dari bangku kuliah yang harus disalurkan kepada masyarakat secara luas.

Melihat pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kecakapan dalam pemahaman, perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan yang baik dan tepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan finansial dan taraf hidup yang lebih baik.

d. Lembaga Keuangan

Sistem Keuangan terbentuk dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam memcocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan bagian yang besar dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), maka sumberdaya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal, sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup negara tersebut.

1. Lembaga-lambaga keuangan

Ketika berada pada tingkat yang lebih luas, perbankan menjadi media intermediasi yang mampu mengalihkan sumberdaya ekonomi dari penabung kepada peminjam. seseorang menyimpan dananya pada lembaga keuangan dikarenakan berbagai alasan diantaranya persiapan dana pendidikan anak, tabungan saat pensiun (simpanan hari tua), tabungan masa depan. Begitu juga dengan peminjam, mereka meminjam dana dari bank karena berbagai alasan diantaranya untuk modal usaha, perluasan usaha, dan lain-lain. Sistem keuangan disusun oleh beragam lembaga keuangan yang membantu dalam mengoordinasikan penabung dan peminjam. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu pasar keuangan dan perantara Keuangan.

a. Pasar Keuangan

Pasar keuangan (*financial markets*) merupakan lembaga tempat dimana orang yang ingin menyimpan dapat secara langsung menyediakan dana kepada orang yang ingin meminjam. Ada dua pasar keuangan yang paling penting dalam perekonomian adalah

1) Pasar Obligasi (*bond Markets*)

Obligasi (*Bond*) merupakan surat utang yang menyatakan kewajiban kewajiban pihak opeminjam kepada pihak

pemegang obligasi tersebut. Sederhananya obligasi adalah sebuah instrumen utang.

2) Pasar Saham

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika seseorang membeli saham berarti membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden. Jika perusahaan membukukan keuntungan, maka anda juga bisa mengambil keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu.

b. Lembaga-lembaga Perantara Keuangan

Lembaga-lembaga perantara keuangan adalah lembaga keuangan tempat dimana penabung dapat secara tidak langsung menyediakan dana kepada peminjam. Istilah perantara melambangkan peran lembaga-lembaga keuangan yang berdiri antara pihak penabung dan pihak peminjam. Perantara keuangan yang sangat penting dikelompokkan menjadi dua yaitu

1) Bank

Bank adalah perantara keuangan yang sangat dikenal oleh masyarakat. Tugas utama bank adalah menerima tabungan dari orang-orang yang ingin menyimpan uang dan menggunakan tabungan tersebut untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ingin meminjam uang. bank memberikan bunga kepada

penabung dari tabungannya dan membebankan bunga sedikit lebih tinggi kepada peminjam dari pinjamannya. Selisih antara suku bunga yang diberikan kepada penabung dan yang diambil dari peminjam akan digunakan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank serta memberikan keuntungan bagi bank tersebut.

Selain menjadi lembaga perantara keuangan, bank memainkan peran kedua yang sangat penting bagi perekonomian yang itu bank memfasilitasi pembelian barang dan jasa dengan mengizinkan orang-orang untuk menulis cek dari tabungannya. Dengan kata lain bank membantu dalam menciptakan aset istimewa yang dapat digunakan oleh orang-orang sebagai alat tukar.

2) Reksa Dana (*mutual Fund*)

Reksa dana adalah lembaga yang menjual saham kepada publik dan menggunakan hasilnya untuk membeli portofolio, berbagai jenis saham, dan obligasi. Pemegang saham reksa dana menerima semua risiko dan hasil investasi yang berhubungan dengan portofolio. Jika nilai portofolio naik, maka pemegang saham akan memperoleh keuntungan, begitu pula sebaliknya jika nilai portofolio mengalami penurunan maka pemegang saham akan merugi.

Perekonomian yang matang terdiri atas banyaknya ragam lembaga keuangan. Selain pasar obligasi, pasar saham, bank, dan

reksa dana, ada juga dana pensiun, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, bahkan lintah darat. Untuk mengefisiensikan kegunaan dari lembaga keuangan tersebut tentunya harus didukung pengetahuan seseorang tentang lembaga keuangan maupun pengelolaan dari keuangan itu sendiri, agar dapat digunakan sebaik mungkin dan tepat guna. Pengetahuan akan keuangan (melek keuangan) disebut juga dengan istilah literasi keuangan.

e. Cakupan Literasi Keuangan

Pada umumnya masyarakat lebih mengenal lembaga jasa keuangan, akan tetapi cakupan dalam literasi keuangan tidak hanya sebatas pada lembaga keuangan bank saja tetapi cakupan dalam literasi keuangan tidak hanya sebatas pada lembaga keuangan bank saja tetapi mencakup beberapa lembaga yang lainnya seperti, asuransi, pensiun, pasar modal, pegadaian serta perusahaan pembiayaan.

a. Perbankan

Perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya.

b. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Dana pensiun terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1) Dana pensiun lembaga keuangan

- 2) Dana pensiun pemberi kerja
- 3) Dana pensiun berdasarkan keuntungan.

c. Asuransi

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- 1) Memberikan pengganti kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, biaya yang ditimbulkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah diterapkan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.

d. Pasar Modal

Pasar Modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, serta perusahaan – perusahaan Public yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya. Sehingga lembaga dan profesi lainnya yang bersangkutan dengan Efek tersebut.

e. **Pegadaian**

Usaha pegadaian merupakan segala usaha yang menyangkut pemberin pinjaman barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya. Pegadaian melakukan kegiatan lembaga keuangan berbentuk pembiayaan salam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar gadai.

f. **Perusahaan Pembiayaan**

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dana atau jasa.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi ukmk adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produkti milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang – undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh orang perorangan atau usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

- 3) Usaha besar yang memenuhi beberapa kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang erorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atay menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kementrian Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) pertahun. Sementara itu Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kepkyaan bersih paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan omzet per tahun maksimal

(lima puluh milyar rupiah) (Sumodiningrat dan Wulandari, 2015).

Tabel 2.1
Kriteria UMKM dan Usaha Besar berdasarkan Omset usaha

Jenis Usaha	Kriteria	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta – Rp500 juta	>Rp 300 juta – 2,5 milyar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta – 10 milyar	>Rp 2,5 milyar – Rp50 milyar
Usaha Besar	>Rp 10 milyar	>Rp 50 milyar

Sumber: Profil Bisnis UMKM, Bank Indonesia 2015

b. Karakteristik UMKM

Menurut (Mubyarto, 2009) Bung Hatta mrngatakan konsep coopreation adalah wadah untuk produksi satu – satunya yang dimiliki oleh rakyat sebagai penolakan rakyat terhadap kapitalisme, liberalisme dan penolakan Marxisme dan komunisme. Konsep cooperation adalah program penerapan sistem ekonomi jangka panjang, sehingga waktu itu (sekitar tahun 1950-an) keberadaan kapitalisme masih di perbolehkan, sembari memperkuat sendi – sendi koperasi. Bung Hatta berharap dalam jangka panjang sistem ekonomi koperasi yang berlaku di Indonesia tidak ada lagi sistem kapitalisme. Salah satu pemikiran Bung Hatta dengan konsep cooperative dan konsep Marhaenisme Soekarno tersebut pada saat ini sangat identik dengan bentuk aktivitas ekonomi sebagaian besar

rakyat Indonesia yang bergerak dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berikut karakteristik UMKM dan Usaha Besar menurut bank Indonesia :

Tabel 2.2
Karakteristik UMKM dan Usaha Besar

Jenis Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis produk tidak selalu tetap, sewaktu waktu bisa berganti • Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu waktu dapat berpindah tempat • Keuangan usaha masih tercampur dengan keuangan keluarga • Contoh: pedangan kaki lima, pedagang kecil, dipasar tradisional
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang / komoditi yang di usahakan umumnya sudah tetap dan tidak mudah berubah • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah- pindah • Keuangan perusahaan sudah di pisahkan dengan keuangan keluarga • Contoh: pedagang grosir (agen), pengusaha pakaian jadi
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki menejemen yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas, bagian produksi, bagian keuangan dan pemasaran (sesuai kebutuhan perusahaan) • Memiliki akses kepada sumber – sumber pendanaan perbankan • Sudah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik • Contoh: perusahaan pertambangan, kontruksi
Usaha Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia

Sumber: Profil Bisnis UMKM, Bank Indonesia 2015

c. Bentuk Perusahaan UMKM

Menurut Muhammad dan khairandi dalam buku UMKM di Indonesia prespektif Hukum Ekonomi yang ditulis oleh (Mubyarto, 2009), bentuk perusahaan yang ada dalam UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Perusahaan Perorangan
- b) Perusahhan Firma
- c) Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
- d) Perseroan Terbatas
- e) Koperasi
- f) Perusahaan Milik Negara, yang teridiri dari perusahaan perseroan (Persero) atau perusahaan umum (Perum).

d. Peran UMKM

Bank Indonesia (2015), Peran UMKM dalam masalah pertumbuhan ekonomi bangsa sudah tidak diragukan lagi, penyerapan terhadap tenaga kerja dan produk domestik bruto yang meningkat tiap tahunnya adalah bukti nyata bahwa UMKM menjadi primadona ekonomi Indonesia.

UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan pendapatan.

B. Peneliti terdahulu

Penelitian terkait dengan tingkat literasi keuangan pernah dilakukan sebelumnya, dan berikut ini adalah beberapa uraian penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yang di antara lain hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Amaliyah, 2015) mengadakan penelitian mengenai literasi keuangan dikalangan pelaku usaha. Jenis penelitian ini adalah survey menggunakan kuisioner dengan metode analisis logistic biner. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat literasi keuangan UMKM kota Tegal berada dalam kategori tinggi dengan rata – rata 11.79. dalam penelitiannya jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat literasi pemilik UMKM kota Tegal. Pemilik UMKM laki – laki dan tingkat pendidikan diatas wajib belajar memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan wanita dan tingkat pendidikan dibawah wajib belajar. Sedangkan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan pemilik UMKM kota Tegal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aribawa, 2016) dalam penelitiannya dilakukan oleh Aribawa menyatakan bahwa adanya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM kreatif di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan literasi keuangan yang baik, diharapkan UMKM mampu membuat keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agusta, 2016) dalam penelitian yang dilakukan oleh Adib agusta menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang ada di Pasar Koga Bandar Lampung tergolong pada kriteria well literate, tingkat gender dan pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Kepemilikan akun yang dimiliki para pemillik UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung didominasi oleh produk perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widiowati, 2017) dalam penelitian yang dilakukan oleh Widowati dan Winarto menyatakan pola perilaku konsumsi responde adalah kurang dari 60% dari penghasilan yang digunakan untuk konsumsi, 100% responden menyatakan bahwa menabung dilakukan dengan penyisihan khusus dari pengasilan, 97,66% responden memilih tabungan sebagai pilihan investasi dan 97% responden memilih tanah/rumah/property sebagai instrument investasi untuk dana berlebih. Tingkat literasi keuangan responden adalah not literate 36%, less literate 28%, sufficient literate 27% dan well literate 9%. Peran lembaga terkait edukasi keuangan ke masyarakat masih rendah dan masyarakat masih kurang paham dengan lemabaga keuangan dan produk – produknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Djuwita, 2018) dalam penelitian yang dilakukan oleh Djuwita dan Yusuf menyatakan hanya variabel lama usaha dan jumlah karyawan yang berpengaruh signifikan terhadap financial knowledge. Seluruh variabel demografi (lokas, usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis usaha, lama usaha, modal awal dan financial

attitude para pedagang kaki lima. Hanya financial behavior saja yang mempengaruhi perkembangan usaha para pedagang kaki lima, sementara financial knowledge dan financial attitude tidak mempengaruhi perkembangan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jeyaram, 2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustapa dan Jerayam menyatakan hasil laki – laki memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan, dan etnis cina memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan melayu, dan lainnya. Mahasiswa akuntansi memiliki tingkat literasi keuangan yang paling baik dibandingkan dengan bisnis ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Murugiah, 2016) dalam penelitian yang dilakukan Murugiah menyatakan dapat menghasilkan temuan dari beberapa variabel independen yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan seseorang, variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh paling tinggi untuk tingkat literasi keuangan, diikuti oleh tingkat pendapatan, usia, dan jenis kelamin. Usia 41-45 paling tinggi. Sedangkan jenis pekerjaan dan status pernikahan tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yildirim, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penelitian tingkat literasi keuangan digolongkan dalam dua kategori, yaitu literasi keuangan dasar dan lanjutan. Ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan rata – rata karyawan Kardimir Inc. rata – rata

berada di tingkat literasi keuangan dasar, dan tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan, dimana jika penghasilan dan pendidikan makin tinggi meningkat, maka tingkat literasi keuangan juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mbarire, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa temuan dari beberapa independen yang mempengaruhi tingkat literasi seseorang seperti variabel jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan tambahan, sumber informasi dan penasehat keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan.

Penelitian yang dilakukan (Joke, 2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa rata-rata kemampuan literasi keuangan Malaysia berada di tingkat yang baik dan variabel seperti jenis kelamin, pendapatan, etnis/suku, status pernikahan, tingkat pendidikan, berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat literasi keuangan.

C. Hipotesis

berdasarkan kerangka berfikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang harus diuji dalam penelitian ini yaitu :

H1 : Diduga terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku

Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Jenis Kelamin.

H2 : Diduga terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku

Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Usia.

H3 : Diduga terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku

Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Lama Usaha.

H4 : Diduga terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku

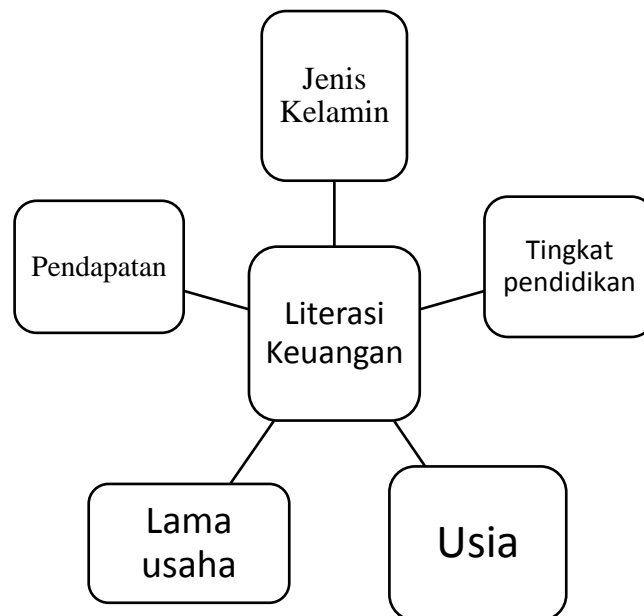
Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Tingkat Pendidikan.

H5 : Diduga terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku

Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Pendapatan.

D. Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran teoritis pada penelitian yang bertujuan untuk menganalisa tingkat literasi keuangan pada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir